



**Indikator
Kesejahteraan
Rakyat
Kota Singkawang
2018**





<https://www.singkarawati.com>

**Indikator
Kesejahteraan
Rakyat
Kota Singkawang
2018**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SINGKAWANG 2018**

ISBN : 978-623-70870-2-1
Katalog BPS : 4102004.6172
No. Publikasi : 6172.1902
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 49 halaman

Penyusun Naskah:

BPS Kota Singkawang

Penyunting:

BPS Kota Singkawang

Gambar Kulit:

BPS Kota Singkawang

Diterbitkan Oleh:

© BPS Kota Singkawang

Dicetak Oleh:

CV. Anugrah Makmur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SINGKAWANG 2018

Pengarah:

Firmansyah, SE., MM.

Penanggung Jawab Umum:

Firmansyah, SE., MM.

Penanggung Jawab Teknis:

Firmansyah, SE., MM.

Editor:

Firmansyah, SE., MM.

Penulis & Pengolahan Data:

Fenny Pebrina Marpaung, SST.

Desain/Layout:

Fenny Pebrina Marpaung, SST.

KATA PENGANTAR

Informasi capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan arah pembangunan. Capaian pembangunan bisa terukur ketika ada keterbandingan data antar waktu dan sifatnya berkesinambungan. BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menghasilkan beberapa indikator statistik sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran akuntabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Singkawang 2018” ini menampilkan beberapa informasi umum kesejahteraan rakyat yang meliputi indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga (makanan dan non makanan). Terbitnya publikasi ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi pelaku dan perencanaan pembangunan wilayah sehingga arah pembangunan kesejahteraan rakyat lebih terarah dan tepat sasaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi hingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat kepada segenap penggunanya.

Singkawang, Maret 2019

Kepala BPS Kota Singkawang



Firmansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Kependudukan	5
Bab III. Kesehatan dan Gizi	15
Bab IV. Pendidikan	19
Bab V. Ketenagakerjaan	24
Bab VI. Taraf dan Pola Konsumsi	29
Bab VII. Perumahan dan Lingkungan	32
Bab VIII. Kemiskinan	44
Bab IX. Sosial Lainnya	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018	7
Tabel 2.2. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2010-2018	9
Tabel 2.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Singkawang, 2010-2018	12
Tabel 2.4. Persentase Perempuan Berumur 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Pendidikan Tertinggi dan Usia Perkawinan Pertama Kota Singkawang, 2018	14
Tabel 3.1. Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kota Singkawang, 2018	16
Tabel 4.1. Angka Melek Huruf Kota Singkawang, 2018	20
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Kota Singkawang, 2018	21
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kota Singkawang, 2018	21
Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kota Singkawang, 2018	22
Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Formal Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kota Singkawang, 2018	23
Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kota Singkawang, 2018	25
Tabel 5.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018	26
Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018	27
Tabel 5.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Singkawang, 2018	28
Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Kota Singkawang, 2015 – 2018	31

Tabel 6.2. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Kota Singkawang, 2015 – 2018	32
Tabel 8.1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Singkawang, 2016 – 2018	44
Tabel 8.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Singkawang, 2016 – 2018	45
Tabel 9.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan Terakhir Kota Singkawang, 2018	47
Tabel 9.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset Kota Singkawang, 2018	49

<https://singkawangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melakukan Program KB Menurut Jenis Alat KB Kota Singkawang, 2018	17
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kota Singkawang, 2018	18
Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati Kota Singkawang, 2018	34
Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah per Kapita Kota Singkawang, 2018	35
Gambar 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Kota Singkawang, 2018	36
Gambar 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Kota Singkawang, 2018	36
Gambar 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Kota Singkawang, 2018	37
Gambar 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kota Singkawang, 2018	38
Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Kota Singkawang, 2018	39
Gambar 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak Kota Singkawang, 2018	40
Gambar 7.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Jamban/Kakus Kota Singkawang, 2018	41
Gambar 7.10. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Jamban/Kakus Menurut Jenis Kloset Kota Singkawang, 2018	42
Gambar 7.11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Jamban/Kakus Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kota Singkawang, 2018	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Umum

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Otonomi daerah melahirkan kebutuhan data hingga level kabupaten/kota. Data-data tersebut diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan dan evaluasi program pembangunan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, mulai tahun 2015, pengumpulan data SUSENAS dilaksanakan pada bulan Maret dengan sampel sebanyak 300.000 rumah tangga sehingga memungkinkan estimasi hingga level kabupaten/kota. Manajemen SUSENAS juga telah disempurnakan sehingga data-data hasil SUSENAS Maret dapat dipublikasikan pada tahun yang sama.

SUSENAS menghasilkan beragam statistik lintas sektor, meliputi partisipasi sekolah dan kemampuan membaca dan menulis untuk bidang pendidikan; gangguan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, pemberian ASI pada baduta, dan imunisasi pada balita untuk bidang kesehatan; penolong persalinan, umur perkawinan pertama, partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan atau program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

SUSENAS juga mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, baik untuk komoditas makanan maupun non makanan. Dari data tersebut diperoleh rata-rata konsumsi dan pengeluaran rumah tangga serta rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita. Data konsumsi dan pengeluaran yang dirinci menurut kelompok komoditas dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi penduduk di suatu wilayah.

1.1.2. Sistematika Penyajian

Publikasi ini terbagi atas sepuluh bab yang terdiri atas penjelasan dan tabel. Bagian pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum, metode survei yang meliputi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan penarikan sampel, metode pengumpulan data, dan pengolahan data. Tabel pada publikasi ini terdiri dari tabel data kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, serta konsumsi dan pengeluaran. Bab terakhir berisi ulasan mengenai perkembangan terkini di masyarakat.

Penyajian data dalam tabel-tabel pada publikasi ini menggunakan tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Tidak ada atau nol : -
- b. Data tidak dapat ditampilkan : N/A

Data-data yang disajikan dalam publikasi ini disajikan menurut karakteristik individu dan rumah tangga. Secara umum, disagregasi data dalam publikasi ini meliputi:

- a. Jenis kelamin
- b. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga (KRT) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh KRT yang dinyatakan dengan ijazah tertinggi yang dimiliki oleh KRT. Pendidikan tertinggi KRT dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
 - i. Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD adalah KRT yang tidak pernah sekolah dan KRT yang pernah sekolah hingga jenjang SD/ sederajat tetapi tidak tamat/lulus.
 - ii. SD/ sederajat adalah KRT yang pernah bersekolah dan memiliki ijazah tertinggi SD/MI/SDLB/Paket A.
 - iii. SMP/ sederajat adalah KRT yang pernah bersekolah dan memiliki ijazah tertinggi SMP/MTs/SMPLB/Paket B.
 - iv. SMA ke atas adalah KRT yang pernah bersekolah dan memiliki ijazah SMA/SMK/MA/SMK/MAK/SMLB/Paket C, Diploma, S1, S2, atau S2.

1.2. METODE SURVEI

1.2.1. Ruang Lingkup

SUSENAS dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan ukuran sampel secara nasional sebesar 300.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Sampel SUSENAS hanya mencakup rumah tangga biasa, tidak termasuk rumah tangga khusus, seperti barak militer, asrama, penjara, dan sejenisnya.

Sampel SUSENAS Maret 2018 untuk Kota Singkawang sebesar 520 rumah tangga yang tersebar di 5 kecamatan. Data yang dihasilkan cukup representatif untuk menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota tetapi tidak dapat dibedakan menurut daerah tempat tinggal (perkotaan atau perdesaan).

1.2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau *sampling frame* induk pada kegiatan SUSENAS adalah 25 persen (sekitar 180.000 blok sensus) dari *master frame* blok sensus hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang ditarik secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan ukuran rumah tangga hasil SP 2010.

Tahapan pembentukan kerangka sampel SUSENAS adalah sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP 2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah 25 persen blok sensus SP 2010 yang sudah ada kode stratanya. 25 persen blok sensus ini yang disebut dengan *sampling frame* induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

1.2.3. Desain Sampel untuk Estimasi Kabupaten/Kota

Sampel dipilih dengan metode *two stages one phase stratified sampling*:

Tahap 1: Memilih 25 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP 2010 di setiap strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah *n* blok sensus sesuai lokasi secara *systematic* di setiap strata *urban/rural* per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.

Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT.

1.2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data SUSENAS Maret 2018 menggunakan dua kuesioner, yaitu kuesioner KOR (VSEN18.K) dan kuesioner konsumsi dan pengeluaran (VSEN18.KP). Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang memberikan jawaban secara langsung kepada pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

1.2.5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan pengecekan awal atas kelengkapan isian kuesioner dan pemeriksaan konsistensi antar isian yang berkaitan. Selanjutnya, dilakukan perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner, sampai dengan tahap tabulasi sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk konsistensi antara satu jawaban dengan jawaban lainnya.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Dalam hal ini, penduduk tidak hanya diposisikan sebagai subjek tetapi juga sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi penyediaan sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan gerak langkah pembangunan. Namun, tentu saja hal ini harus diikuti dengan peningkatan kualitasnya, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI tidak terlepas dari penduduk, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Besarnya jumlah penduduk akan menjadi hambatan pembangunan jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, serta kesehatan yang layak.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak huni. Hal itu dapat terjadi karena lahan untuk pemukiman tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul antara lain gangguan keamanan akibat maraknya aksi kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas SDM akibat dari

sarana pendidikan yang terbatas. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.

2.1. JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan di perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas SDM. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diimbangi dengan kualitas penduduk akan menjadi kendala pembangunan. Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar, seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia tercukupi. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum cukup mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan, masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia.

Informasi tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk sangat bermanfaat untuk menganalisis berbagai fenomena demografi dan implikasi yang ditimbulkannya. Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan, tingkat kelahiran, tingkat kematian, kepadatan penduduk, dan masalah pemukiman, serta permasalahan lain terkait kependudukan.

Sementara itu, komposisi penduduk menurut umur penting untuk diketahui, terutama untuk menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Program pembangunan yang dimaksud, antara lain perencanaan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing terkait dengan kebutuhan pangan, sandang, pangan, pekerjaan, dan sebagainya.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018

No.	Kecamatan	Luas		Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Wilayah (km ²)	Laki-laki			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Singkawang Selatan	224,48	25.499	23.265	48.487	216
2.	Singkawang Timur	166,26	11.933	10.691	20.557	124
3.	Singkawang Utara	66,65	12.965	12.858	23.771	357
4.	Singkawang Barat	18,06	27.730	27.273	57.293	3.172
5.	Singkawang Tengah	28,55	33.655	33.192	68.953	2.415
	2 0 1 8 ²⁾	504,00	111.782	107.279	219.061	435
	2 0 1 7 ²⁾	504,00	109.902	105.394	215.296	427
	2 0 1 6 ²⁾	504,00	107.975	103.533	211.508	420
	2 0 1 5 ²⁾	504,00	106.125	101.476	207.601	412
	2 0 1 4 ²⁾	504,00	102.718	99.478	202.196	401

Catatan: ²⁾ Proyeksi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut hasil proyeksi penduduk tahun 2018 sekitar 219.061 jiwa yang terdiri dari 111.782 jiwa penduduk laki-laki dan 107.279 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduknya sebesar 104. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 104 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, di Kota Singkawang jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di 5 kecamatan di Kota Singkawang tidak ada satupun kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Singkawang Utara (101) diikuti oleh Kecamatan Singkawang Tengah (101). Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi adalah Kecamatan Singkawang Timur (112), kemudian diikuti oleh Kecamatan Singkawang Selatan (109) dan Kecamatan Singkawang Barat (102). Angka *sex ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang dapat mencerminkan perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan.

2.2. PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih dihadapi Kota Singkawang adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah kecamatan, kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai, bukan pantai, atau perkotaan dan perdesaan.

Seiring jumlah penduduk yang semakin bertambah, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk pada suatu wilayah. Secara umum, tingkat junian penduduk di Kota Singkawang masih tergolong jarang, yaitu sekitar 435 jiwa/km². Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 3.172 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Singkawang Timur dengan luas sekitar 32,99 persen dari total wilayah Kota Singkawang hanya dihuni 124 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan terluas, yaitu Kecamatan Singkawang Selatan dihuni sebanyak 216 jiwa/km².

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk setiap tahun, laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,75 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Singkawang periode 2010-2018 mencapai 2,03 persen. Perlambatan pertumbuhan penduduk terjadi dapat disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang.

Tabel 2.2. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2010 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	187.188	-	104,99	371
2011	191.264	2,18	104,83	379
2012	194.918	1,91	104,30	387
2013	198.742	1,96	103,74	394
2014	202.196	1,74	103,26	401
2015	207.601	2,67	104,58	412
2016	211.508	1,88	104,29	420
2017	215.296	1,79	104,28	427
2018	219.061	1,75	104,20	435

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035

Berdasarkan kecamatan, pada periode 2017-2018, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Singkawang Selatan berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang, yaitu sebesar 1,77 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang Utara, dan Singkawang Barat berada di bawah angka laju pertumbuhan Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah karena luas wilayahnya sebesar 166,26 km² atau hanya sekitar 32,99 persen dari luas wilayah Kota Singkawang hanya dihuni rata-rata 124 jiwa per km². Di lain sisi, Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sekitar 18,06 km² memiliki jumlah penduduk paling banyak mencapai 56.315 jiwa atau sekitar 26,16 persen dari total penduduk Kota Singkawang. Dengan demikian, Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, yaitu rata-rata 3.172 orang per km².

Distribusi penduduk yang tidak merata juga dapat menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu daerah. Ada beberapa daerah yang mempunyai penduduk yang banyak dan di daerah lain penduduknya relatif sedikit. Hal ini berpengaruh pada kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya permintaan akan lapangan pekerjaan. Jika permintaan dan penawaran tidak sebanding, maka akan tercipta pengangguran. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kebutuhan lahan untuk pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dapat menyebabkan terhambatnya akselerasi pembangunan akibat kurangnya SDM dalam memanfaatkan SDA yang tersedia.

2.3. Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk muda (0-14) tahun, usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65+ tahun). Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Singkawang adalah penduduk usia produktif dengan tren yang semakin meningkat di atas 64 persen, sedangkan persentase penduduk usia muda menunjukkan tren yang menurun.

Peningkatan struktur penduduk usia produktif dan penurunan struktur penduduk usia tidak produktif (usia muda dan lansia) memberikan dampak pada angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan (*independency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2011-2018 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 angka beban ketergantungan Kota Singkawang sebesar 55,44 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 penduduk usia belum produktif, dan tidak produktif. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan penduduk turun menjadi

54,03 persen. Pada tahun 2018, angka beban ketergantungan penduduk Kota Singkawang berada pada posisi 53,71 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 54 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan ini akan diperkirakan akan cenderung menurun dan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu, akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi SDM guna mendorong produksi. Namun, perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka berada pada golongan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2.3. Komposisi Penduduk (persen) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Singkawang, 2010 – 2018

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	31,08	64,14	4,77	55,91
2011	30,79	64,31	4,90	55,44
2012	30,50	64,46	5,04	55,01
2013	30,21	64,60	5,18	54,61
2014	29,95	64,71	5,34	54,30
2015	29,69	64,80	5,51	54,03
2016	29,41	64,90	5,69	53,75
2017	29,13	64,99	5,88	53,87
2018	28,86	65,06	6,09	53,71

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2035

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ada sebanyak 31,08 persen penduduk yang berusia muda dan turun menjadi 28,86 persen pada tahun 2018.

Pada Tabel 2.3, terlihat bahwa struktur umur penduduk Kota Singkawang masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Pada tahun 2010 mencapai 64,14 persen dan meningkat menjadi 65,06 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Singkawang sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 4,77 persen pada tahun 2010 menjadi 6,09 persen pada tahun 2018.

Peningkatan *share* struktur umur penduduk usia tua dan lansia yang dimbangi dengan penurunan *share* penduduk usia muda, selain mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk juga memperkecil angka rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap total penduduk usia produktif. Kumulatif dari semuanya

mengidentifikasi peningkatan kualitas penduduk atau menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan di Kota Singkawang.

2.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama penduduk perempuan. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi dan semakin besar peluang melahirkan lebih banyak anak. Usia perkawinan pertama juga menjadi indikator kesehatan khususnya bagi perempuan. Perkawinan di usia terlalu muda meningkatkan resiko pada kematian bayi yang dilahirkan. Perkawinan di usia muda memperkecil peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini terkait dengan kematangan fisik dan mental serta pengetahuan reproduksi bagi perempuan dikala melahirkan dan merawat anak yang dilahirkan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang adalah 21-25 tahun.

Pada tahun 2018, persentase wanita Kota Singkawang berumur 20 – 24 tahun yang melakukan perkawinan pertama pada umur kurang dari 18 tahun paling banyak dilakukan oleh penduduk perempuan yang pendidikan tertingginya adalah SMA ke atas, yaitu sebesar 62,69 persen. Sementara itu, penduduk perempuan berumur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertamanya lebih dari 18 tahun paling banyak dilakukan oleh penduduk perempuan yang pendidikan terakhirnya SMA ke atas dan tidak pernah sekolah/tidak tamat SD, yaitu sebesar 26,77 persen dan 25,07 persen.

Tabel 2.4. Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Usia Perkawinan Pertama Kota Singkawang, 2018

Pendidikan Tertinggi	Usia Perkawinan Pertama	
	< 18 Tahun	18 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)
1. Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	8,37	25,07
2. SD dan sederajat	14,04	11,83
3. SMP dan sederajat	14,90	36,33
4. SMA ke atas	62,69	26,77
Kota Singkawang	100	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

BAB III

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Kemajuan bidang kesehatan termasuk salah satu keberhasilan pembangunan. Pemerintah terus mengusahakan agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat secara mudah, merata, dan murah.

Berbagai upaya perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah, seperti melalui pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan, pemerintah mengarahkan agar kualitas dan persebaran tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan terus ditingkatkan. Selain itu, upaya perbaikan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui pencegahan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

3.1. Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik, segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar, seperti sekolah, bekerja, mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan adalah angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu persentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Tabel 3.1. Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kota Singkawang, 2018

Karateristik	Angka Kesakitan (%)	Rata-Rata Lama Sakit (Hari)
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	7,04	5,81
Perempuan	9,65	4,01
Kota Singkawang	8,32	4,48

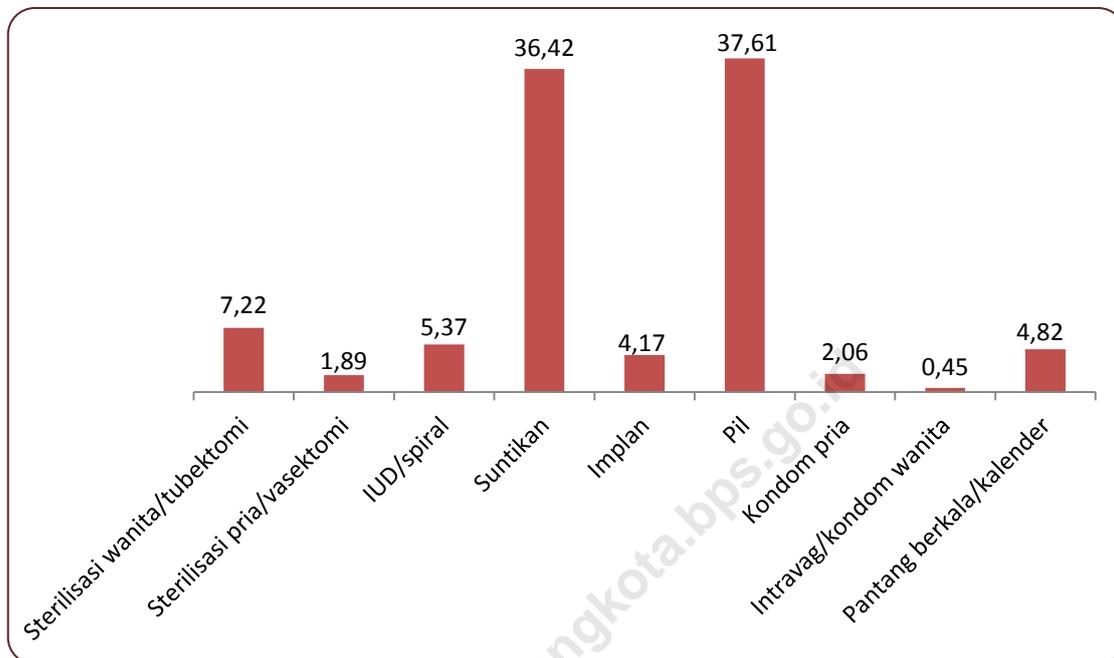
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

3.2. Keluarga Berencana

Tujuan umum Keluarga Berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga.

Merencanakan keluarga sejahtera dengan mengatur jarak kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi dapat dilakukan dengan alat atau alamiah. Metode alamiah adalah seperti kalender (pantang berkala), *koitus interruptus*, atau *ovulation billing*. Metode kontrasepsi dengan alat terbagi menjadi dua menurut jangka waktu efektifitasnya, yaitu kontrasepsi temporer dan permanen. Kontrasepsi temporer antara lain kondom pria dan wanita, pil KB, suntik KB, IUD/spiral, dan implan. Kontrasepsi permanen, antara lain vasektomi, tubektomi, dan implan tuba. Kontrasepsi temporer umumnya digunakan untuk mencegah dan menjaga jarak antar kehamilan, sedangkan kontrasepsi permanen umumnya digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak lagi.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melakukan Program KB Menurut Jenis Alat KB Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

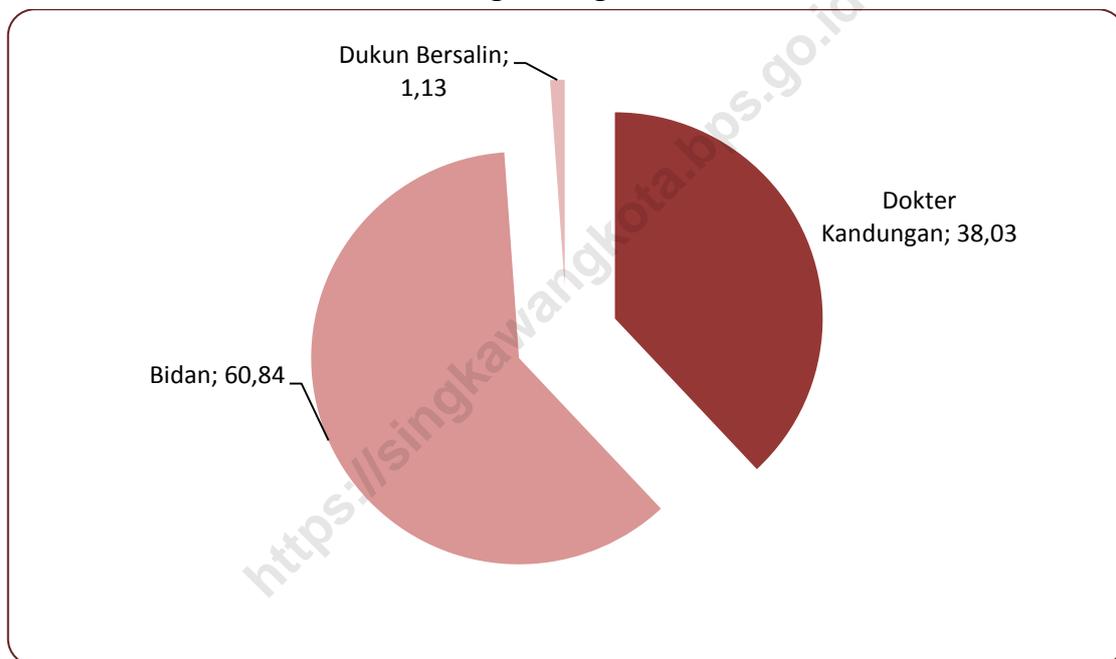
Berdasarkan tabel di atas, alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang melakukan program KB di Kota Singkawang tahun 2018 adalah pil KB dengan persentase sebesar 37,61 persen. Kemudian, alat/cara KB terbanyak kedua adalah suntik KB, yaitu sebesar 36,42 persen. Alat/cara KB dengan pil paling banyak digunakan dapat saja terjadi karena alat KB ini paling mudah ditemukan. Kemudian, suntik KB juga mudah didapatkan di bidan atau puskesmas terdekat dan sudah termasuk ke dalam pelayanan BPJS. Untuk kontrasepsi secara permanen, metode tubektomi/sterilisasi wanita ada sebanyak 7,22 persen dan untuk vasektomi/sterilisasi pria sebesar 1,89 persen. Alat/cara KB yang paling sedikit digunakan adalah kondom wanita, yaitu sebesar 0,45 persen.

3.3. Penolong Kelahiran

Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh penolong persalinan, seperti dokter, bidan, atau dukun bersalin. Penolong persalinan dapat dilakukan oleh lebih dari satu jenis penolong, misal dukun bersalin dan bidan.

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Tingginya angka kematian bayi tentu saja dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya adalah masih kurangnya kemampuan dan keterampilan penolong persalinan. Pemilihan penolong kelahiran tidak hanya memengaruhi status kelahiran bayi tetapi juga memengaruhi angka harapan hidup ibu yang melakukan persalinan.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

Dari gambar 3.2, terlihat bahwa pada tahun 2018 di Kota Singkawang hampir seluruh persalinan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ditolong oleh tenaga medis, yaitu sekitar 98,87 persen. Penolong kelahiran terakhir yang paling banyak adalah bidan, yaitu sekitar 60,84 persen, kemudian dokter kandungan sebesar 38,03 persen. Meskipun demikian, masih ditemukan perempuan 15-49 tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang penolong persalinan terakhirnya adalah dukun bersalin.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara sudah dijamin di dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan sumber daya manusia antara lain Tingkat Pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

4.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis.

Tabel 4.1. Angka Melek Huruf Kota Singkawang, 2018

Karateristik	Melek Huruf		Buta Huruf	
	15-24 th	>15 th	15-24 th	>15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	99,36	95,05	0,64	4,95
Perempuan	100	88,37	-	11,63
Kota Singkawang	99,67	91,77	0,33	8,23

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 di Kota Singkawang terdapat 91,77 persen penduduk di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis, sedangkan 8,23 persen lainnya tidak dapat membaca dan menulis. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki di atas 15 tahun lebih melek huruf dibandingkan perempuan. Kemudian, jika dilihat lebih mendalam lagi, penduduk yang berusia 15-24 tahun masih ada yang tidak dapat membaca dan menulis, yaitu sebesar 0,33 persen dengan kondisi penduduk perempuannya cenderung tidak ada yang buta huruf.

4.2. Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat di dunia pendidikan dapat digunakan beberapa indikator pendidikan, seperti banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah. Semakin besar nilainya, semakin baik partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Pada dasarnya tingkat partisipasi bersekolah penduduk usia sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan fasilitas pendidikan, faktor lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa penduduk usia sekolah (7-24 tahun) di Kota Singkawang pada tahun 2018 yang tidak/belum pernah sekolah ada sebanyak 0,68 persen dan yang sudah tidak bersekolah lagi ada sebesar 32,50 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa para orangtua sudah menyadari bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Kota Singkawang, 2018

Karateristik	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah				Tidak Bersekolah Lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	0,78	38,33	12,79	14,14	1,30	33,65
Perempuan	0,58	36,91	14,78	10,35	6,10	31,29
Kota Singkawang	0,68	37,64	13,76	11,78	3,64	32,50

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menggambarkan proporsi pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5 – 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kota Singkawang, 2018

Karateristik	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	24,62	99,10	90,59	67,07
Perempuan	25,98	98,51	94,00	74,55
2018	25,30	98,82	92,37	70,58
2017	28,68	98,72	93,45	68,16
2016	NA	99,06	87,60	75,94
2015	NA	99,23	90,20	59,23
2014	NA	98,32	97,45	82,35

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Secara umum, APS umur 7 – 12 tahun sebesar 98,82 persen. Hal tersebut menunjukkan dari seluruh penduduk Kota Singkawang pada 2018 pada kelompok umur 7 – 12 tahun, yang masih bersekolah ada sebesar 98,82 persen, sedangkan sisanya 1,18 persen tidak/belum bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Namun, seiring dengan bertambah umur penduduk, APS cenderung mengalami penurunan. Terlihat pada APS penduduk umur 13 – 15 tahun sebesar 92,37 persen yang berarti 7,63 persen dari penduduk pada kelompok umur tersebut tidak/belum bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi.

Kemudian, jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada kelompok umur 16 – 18. APS penduduk perempuan umur 16 – 18 tahun cukup berbeda dengan APS penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut. Selain itu, APS penduduk laki-laki umur 7 – 12 tahun hampir mencapai 100 persen yang menunjukkan hampir seluruh penduduk laki-laki usia 7 – 12 tahun di Kota Singkawang tahun 2018 mengikuti pendidikan formal.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kota Singkawang, 2018

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	114,99	79,07	70,45
Perempuan	119,40	79,14	59,31
2018	117,07	79,11	65,22
2017	118,71	74,98	85,03
2016	114,25	75,87	90,33
2015	117,44	74,83	69,36
2014	111,70	87,35	86,95

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Pada tahun yang sama, APK SD/ sederajat bernilai sebesar 117,07 persen yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah SD lebih besar dibandingkan penduduk umur 7 – 12 tahun. Dengan kata lain, terdapat penduduk yang sudah bersekolah SD sebelum umur 7 tahun (*early entry*) atau terdapat penduduk berumur lebih

dari 12 tahun yang masih bersekolah SD. Berbeda dengan jenjang pendidikan SD, pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat nilai APK adalah sebesar 79,11 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk yang bersekolah SMP lebih kecil dibandingkan penduduk umur 13 – 15 tahun. Kondisi tersebut dapat saja terjadi disebabkan penduduk usia tersebut masih bersekolah SD atau sudah bersekolah SMA.

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Formal Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kota Singkawang, 2018

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	99,10	71,67	60,64
Perempuan	98,51	74,65	59,27
2018	98,82	73,23	60,00
2017	98,72	69,20	60,40
2016	98,73	66,61	63,93
2015	96,45	60,59	49,80
2014	93,99	67,76	70,81

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Indikator berikutnya adalah APM. Pola APM di Kota Singkawang pada tahun 2018 menunjukkan pola yang serupa dengan APS, yaitu semakin bertambahnya umur penduduk maka nilai APM semakin mengalami penurunan. APM SD pada tahun 2018 di Kota Singkawang sebesar 98,82 persen. Hal ini berarti dari seluruh penduduk umur 7 – 12 tahun di Kota Singkawang 2018 terdapat 98,82 persen penduduk yang bersekolah SD dan sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan pembangunan.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan cara membekali keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan yang dikehendaki. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dampak dari peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Kondisi ini perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Jika kondisi ini tidak bertemu, maka akan terjadi lonjakan angka pengangguran dengan berbagai karakteristiknya karena tidak sebandingnya antara permintaan dan penawaran pencari kerja terhadap lowongan kerja.

Konsep dan definisi BPS yang diterapkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bekerja adalah melakukan pekerjaan minimal satu jam per hari secara berturut-turut selama seminggu yang lalu. Oleh karena itu, mungkin saja seseorang yang secara kebetulan bekerja (jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal per minggu) pada saat pendataan atau pekerja kurang produktif untuk terjaring sebagai angkatan kerja (AK).

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kota Singkawang, 2018 (persen)

Uraian	2018
(1)	(2)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,07
Tingkat PengangguranTerbuka	7,88

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018

Hasil Sakernas Kota Singkawang tahun 2018 menunjukkan bahwa TPAK sebesar 61,07 persen. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 penduduk Kota Singkawang yang berumur 15 tahun ke atas, terdapat 62 sampai 63 orang tersedia untuk melakukan produksi pada tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Singkawang pada tahun 2018 adalah sebesar 7,88 persen.

5.2. Penduduk yang Menganggur

Penduduk yang tergolong dalam pengangguran adalah mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti terbatasnya lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan yang rencah, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta pemberi kerja, teknologi yang semakin modern sehingga membutuhkan lebih sedikit manusia dalam melakukan proses produksi, dan lain-lain. Pengangguran juga akan menjadi penyebab terjadinya dampak pada beberapa sektor lain, seperti sektor ekonomi, sosial, dan sektor pendidikan.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak Tamat SD dan SD	51,61	6,27	34,33
2. SMP	14,31	-	8,86
3. SMA	21,55	9,37	16,91
4. SMK	7,96	55,26	25,99
5. Diploma I/II/III	4,57	-	2,83
6. Perguruan Tinggi	-	29,1	11,08
Total	100	100	100

Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional, 2018

Pada tahun 2018, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menganggur di Kota Singkawang didominasi dengan penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD dan SD. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang dapat bersaing dengan pencari kerja lain dan seringkali tidak memenuhi persyaratan dari sisi pendidikan. Kemudian, penduduk dengan tingkat pendidikan SMK dan SMA juga turun mendominasi pengangguran pada tahun 2018. Kondisi ini mungkin terjadi karena sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga persaingan antar pencari kerja semakin ketat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tingkat pendidikan tidak tamat SD dan SD, laki-laki lebih banyak menganggur daripada perempuan. Sementara itu, pada tingkat pendidikan Diploma ke atas, penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas di Kota Singkawang pada tahun 2018 cenderung tidak ada yang menganggur. Pengangguran perempuan paling banyak ditemukan pada tingkat pendidikan SMK.

5.3. Lapangan Pekerjaan Utama

Kota Singkawang merupakan kota sering disebut sebagai pusat perdagangan dan pariwisata. Meskipun demikian, pada tahun 2018, penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja paling banyak pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan persentase sebesar 21,24 persen. Kemudian, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase 20,76 persen. Selanjutnya, terdapat lapangan usaha Konstruksi dengan persentase sebesar 10,08 persen.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kota Singkawang, 2018

Lapangan Usaha	Penduduk 15+ yang Bekerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,21	16,40	21,24
2. Pertambangan dan Penggalian	1,34	-	0,83
3. Industri Pengolahan	4,70	10,38	6,86
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,37	1,15	1,29
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,47	-	0,29
6. Konstruksi	16,26	-	10,08
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20,85	20,61	20,76
8. Transportasi dan Pergudangan	4,93	0,40	3,21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	11,56	6,82
10. Informasi dan Komunikasi	0,28	0,71	0,44
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	2,31	3,22
12. Real Estat	0,21	-	0,13
13. Jasa Perusahaan	0,95	0,51	0,78
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	3,73	5,11
15. Jasa Pendidikan	5,61	14,55	9,01
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	6,28	3,34
17. Jasa Lainnya	3,64	11,41	6,60

Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional, 2018

5.4. Status Pekerjaan Utama

Penduduk Kota Singkawang yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja didominasi oleh orang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 59,84 persen. Sementara itu, yang statusnya berusaha ada sebesar 33,44 persen. Hal ini menunjukkan jiwa entrepreneur atau wira usaha di penduduk Kota Singkawang masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian, pekerja keluarga ada sebanyak 3,92 persen yang mengindikasikan bahwa keterlibatan anggota rumah tangga sebagai pekerja keluarga tak dibayar tidak terlalu banyak.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Singkawang. 2018

Status Pekerjaan	Penduduk 15+ yang Bekerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Berusaha sendiri	21,26	22,57	21,76
2. Berusaha dibantu butuh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	7,96	10,46	8,91
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,15	0,53	2,77
4. Buruh/karyawan/pegawai	61,04	57,89	59,84
5. Pekerja bebas di pertanian	0,95	0,96	0,96
6. Pekerja bebas di non pertanian	2,16	1,31	1,84
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar	2,47	6,29	3,92
Total	100	100	100

Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional, 2018

BAB VI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Indikator sosial yang paling menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah pendapatan rumah tangga. Pendapatan penduduk per kapita mencerminkan produktivitas individu dalam bekerja.

Hingga saat ini, pengumpulan data secara khusus yang dapat menjangkau tingkat pendapatan penduduk sangat sulit dilakukan dan data yang dihasilkan cenderung tidak akurat, hasil penelitian menunjukkan bahwa survei khusus yang menyoroti tentang pendapatan penduduk menghasilkan data yang bias dan kurang mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Rumah tangga cenderung enggan untuk memberikan jawaban yang akurat dalam mengemukakan pendapatannya. Selain itu, pada dasarnya pendapatan seseorang memang sulit untuk dihitung, terlebih pendapatan yang tidak menentu. Seseorang dengan upah/gaji yang tetap setiap bulannya pun bisa saja mendapatkan pendapatan lain yang sifatnya tidak menentu. Oleh karena itu, BPS berupaya menggali data pendapatan melalui pendekatan yang paling representatif yaitu pendekatan variabel pengeluaran atau konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran non makanan. Hubungan antara pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan dijelaskan melalui Teori Engel's yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka persentase pengeluaran untuk makanan cenderung semakin rendah. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa suatu rumah tangga dapat dikategorikan lebih sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil daripada persentase pengeluaran untuk bukan makanan.

BPS menggunakan pendekatan variabel (*proxy variable*) yaitu pengeluaran atau konsumsi rumah tangga selama seminggu yang lalu untuk konsumsi makanan, selama sebulan dan setahun yang lalu untuk kelompok konsumsi non makanan. Kedua komponen pengeluaran tersebut selanjutnya diimputasi ke pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita per bulan, baik untuk pengeluaran makanan, non makanan, maupun gabungan keduanya.

6.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran di dalam maupun di luar rumah yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Konsumsi makanan meliputi makanan pokok dan makanan tambahan termasuk penganan kecil.

Pada tahun 2018 terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan adalah sebesar Rp646.832 (tabel 6.1). Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp527.762. Nilai ini juga lebih besar dibandingkan nilai pada tahun 2016.

Jika dilihat lebih rinci, pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan dan minuman jadi selalu menjadi kelompok pengeluaran per kapita makanan terbesar. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp224.205. Nilai ini meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar Rp166.808. Kondisi ini sejalan dengan semakin banyaknya penyedia makanan dan minuman jadi di Kota Singkawang, seperti kafe, restoran, dan *tenant* mal yang semakin banyak disewa. Di posisi berikutnya, kelompok pengeluaran makanan terbesar kedua tahun 2018 adalah ikan, yaitu sebesar Rp77.797. Nilai ini juga mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa himbauan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein sudah mulai diterapkan di masyarakat.

Posisi pengeluaran terbesar ketiga adalah rokok, yaitu sebesar Rp.71.272 per kapita sebulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada konsumsi daging. Selain itu, konsumsi makanan kelompok padi-padian mengalami sedikit peningkatan dan menempati posisi ke-empat pengeluaran terbesar.

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Kota Singkawang, 2016-2018 (rupiah)

No	Kelompok Makanan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padi-padian	62.014	56.804	58.279
2.	Umbi-umbian	7.165	2.984	4.118
3.	Ikan	50.496	58.472	77.797
4.	Daging	43.618	27.736	40.483
5.	Telur dan Susu	43.091	36.242	42.578
6.	Sayur-sayuran	27.089	36.170	38.796
7.	Kacang-kacangan	10.003	9.096	9.929
8.	Buah-buahan	21.483	17.949	22.864
9.	Minyak dan Lemak	9.364	12.017	11.941
10.	Bahan Minuman	14.329	17.111	17.818
11.	Bumbu-bumbuan	9.959	11.574	14.626
12.	Konsumsi Lainnya	13.511	11.872	12.027
13.	Makanan dan Minuman Jadi	133.909	166.808	224.205
14.	Rokok	91.020	62.927	71.372
JUMLAH		537.052	527.762	646.832

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2016 – 2018

6.2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan

Selain pengeluaran konsumsi makanan, pengeluaran konsumsi non makanan juga penting untuk di ketahui. Konsumsi non makanan meliputi pengeluaran untuk kebutuhan sandang, papan, dan lainnya. Kebutuhan papan atau konsumsi perumahan mencakup rekening listrik, pengeluaran air PDAM, kontrak/sewa/perkiraan sewa rumah, perbaikan ringan rumah, dan sejenisnya. Pengeluaran untuk kebutuhan sandang dan lainnya mencakup konsumsi pembelian pakaian jadi dan alas kaki, pajak bumi dan bangunan, biaya pendidikan, transportasi, asuransi yang bukan bersifat menabung, biaya pesta/keagamaan selain konsumsi tamu, dan sejenisnya.

Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan non makanan di Singkawang adalah sebesar Rp639.227. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp548.161. Pola konsumsi non makanan di Singkawang hampir sama setiap tahunnya, yaitu pengeluaran per kapita untuk kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga selalu berada di posisi teratas. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita untuk kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga adalah sebesar Rp335.012.

Tabel 6.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Kota Singkawang, 2016-2018 (rupiah)

No	Kelompok Bukan Makanan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	291.909	287.024	335.012
2.	Aneka barang dan jasa	113.140	123.452	148.431
3.	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	36.098	38.330	43.841
4.	Barang tahan lama	31.044	41.711	50.240
5.	Pajak dan asuransi	22.894	32.622	33.840
6.	Keperluan pesta dan upacara	64.437	25.023	27.862
	Jumlah	559.522	548.161	639.227

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2016 – 2018

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dan kebutuhan dasar di kehidupan manusia. Perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Kemampuan seseorang untuk merealisasikan rumah yang layak huni, tentunya tergantung pada kemampuan finansial dan perkembangan ekonominya.

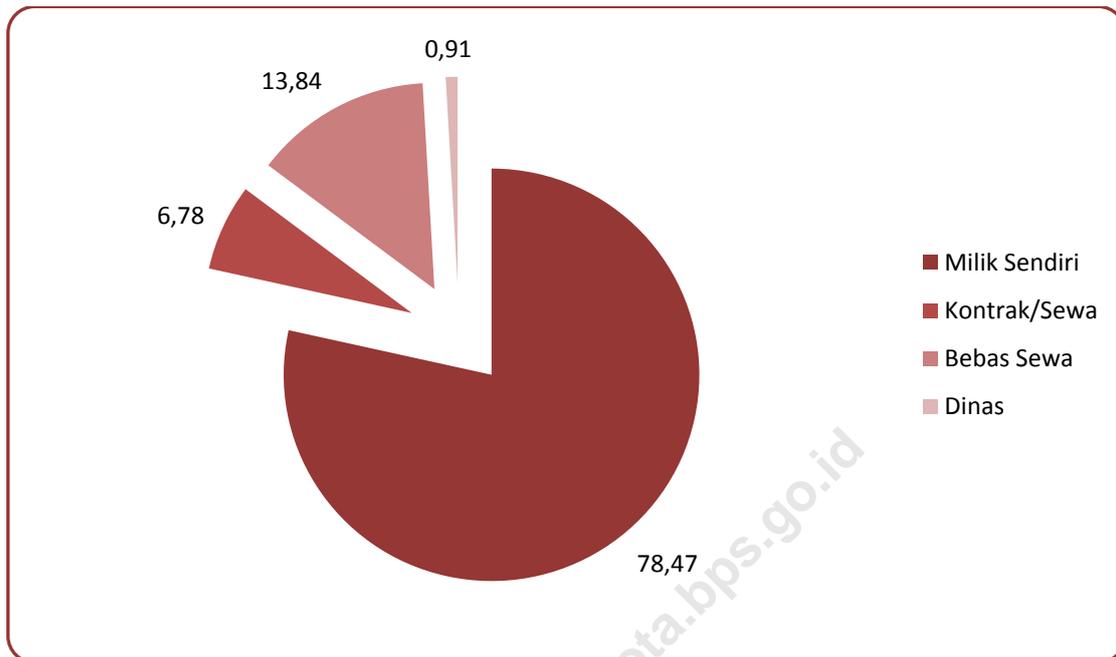
Kondisi fisik dan lingkungan sekitar perumahan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Perumahan yang sehat adalah perumahan yang memenuhi persyaratan layak, seperti kesehatan, keamanan, dan keindahan. Jika ketiga hal ini terpenuhi, maka akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan lingkungan. Ukuran rumah dan lingkungan yang sehat dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain kondisi fisik perumahan dan fasilitas yang tersedia. Kondisi fisik adalah kondisi bangunan, seperti atap, lantai, dan dinding. Fasilitas perumahan meliputi penerangan dan fasilitas lain yang terkait dengan aspek kesehatan.

7.1. Kepemilikan Rumah

Kondisi ekonomi rumah tangga cukup berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup adalah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status kepemilikan rumah lainnya. Status bebas sewa biasanya adalah milik orang tua/sanak saudara yang ditempati oleh rumah tangga lain tanpa perlu membayar sewa. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Pada tahun 2018, sebagian besar rumah tangga di Kota Singkawang menempati rumah milik sendiri dengan persentase sebesar 78,47 persen (Gambar 7.1). Kemudian, sisanya paling banyak menempati rumah bebas sewa dengan persentase sebesar 13,84 persen.

Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati Kota Singkawang, 2018



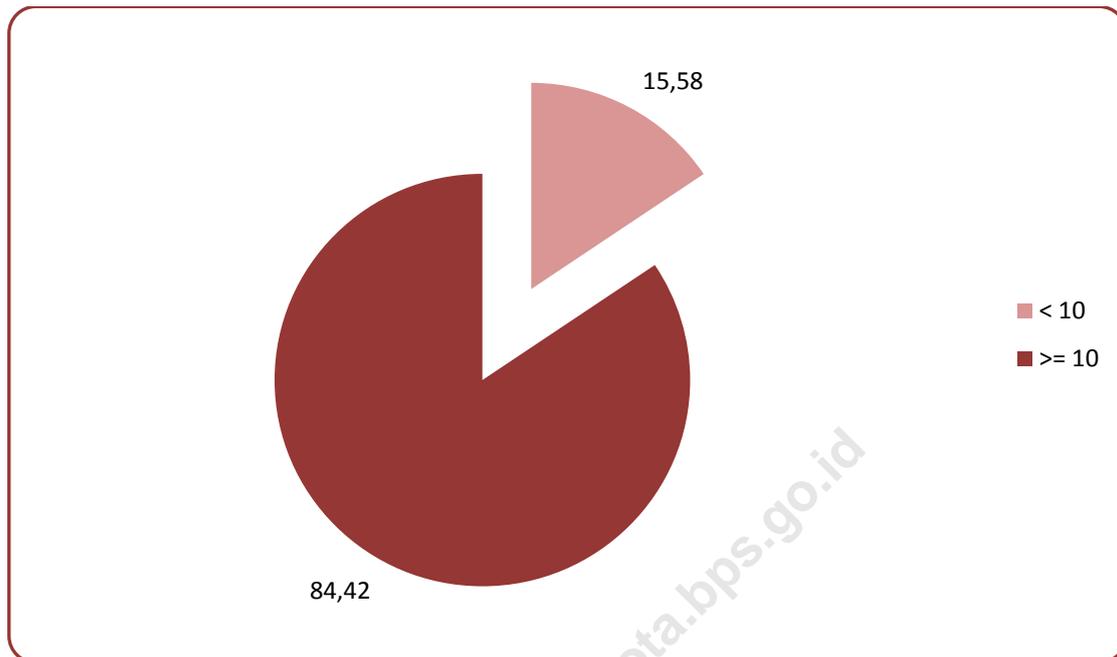
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

7.2. Luas Lantai

Kualitas sebuah rumah dapat diukur dari luas lantai. Luas lantai adalah luas bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Pada umumnya, kualitas rumah berbanding lurus dengan luas lantai. Artinya, semakin baik kualitas rumah, luas lantai akan cenderung semakin besar. Sering dijumpai ketika rumah tangga memperluas lantai rumah, kualitas rumah juga ikut ditingkatkan, sehingga ada korelasi positif antara kualitas rumah dengan luas lantai (BPS: 2011).

Luas lantai per ART mencerminkan kepadatan tingkat hunian tempat tinggal. Semakin besar ukuran luas lantai per ART menunjukkan ruang gerak ART semakin leluasa. Ditinjau dari sisi kesehatan, luas lantai minimal per ART adalah 10 meter persegi (m^2). Tingkat hunian yang rata-ratanya kurang dari $10 m^2$ per ART cenderung dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan, seperti infeksi penyakit kulit dan penyakit menular lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalansi higienis perorangan, kepadatan hunian tempat tinggal atau luas hunian per kapita yang tidak memenuhi syarat kesehatan ($< 10 m^2$) (WHO, 1975).

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah per Kapita Kota Singkawang, 2018



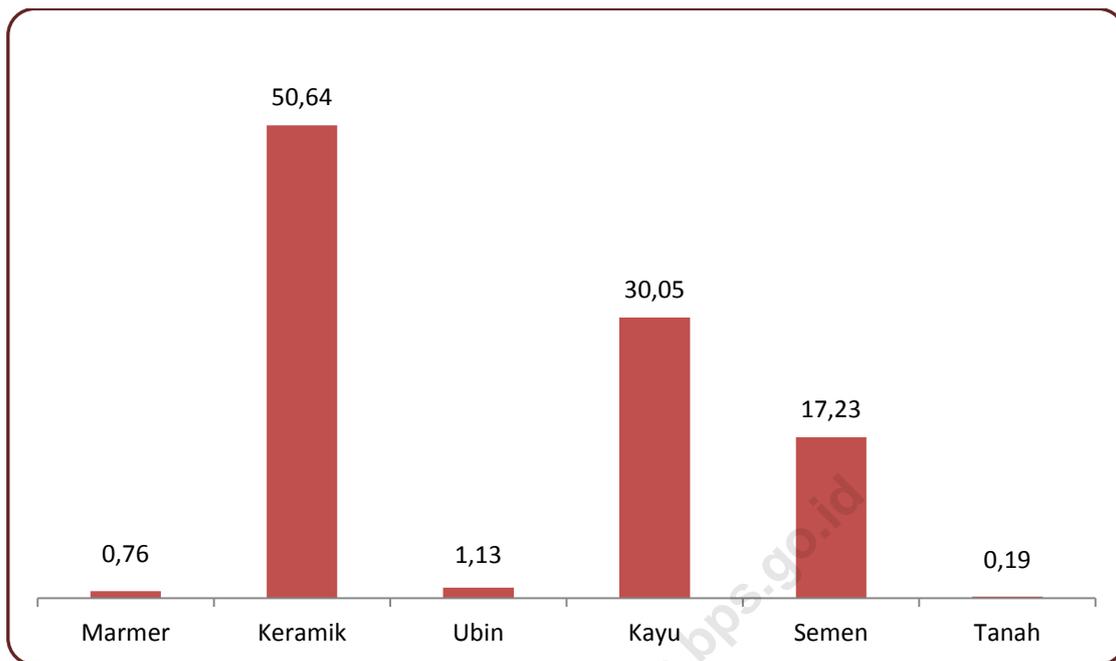
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Pada tahun 2018, sebesar 84,42 persen rumah tangga telah memiliki rumah yang luas lantainya sudah sesuai dengan banyaknya anggota rumah tangga. Meskipun demikian, masih terdapat rumah tangga dengan rumah yang luas lantai per ART kurang dari 10 m², yaitu sebesar 15,58 persen. kondisi ini biasanya terjadi karena budaya/kebiasaan untuk hidup bersama dengan orang tua meskipun sudah menikah sehingga satu rumah dihuni lebih dari satu keluarga.

7.3. Jenis Lantai

Pada tahun 2018, sebesar 99,81 persen rumah tangga sudah menggunakan jenis lantai bukan tanah, sedangkan terdapat 0,19 persen rumah tangga yang masih menggunakan lantai jenis tanah (Gambar 7.3). Dari 99,81 persen tersebut, mayoritas rumah tangga memilih menggunakan lantai jenis keramik, kayu/papan, atau semen/bata merah. Jenis lantai yang di gunakan pada setiap rumah tidak dapat dijadikan patokan kualitas rumah karena perbedaan preferensi masyarakat. Ditinjau dari sisi kesehatan, jenis lantai tanah dinilai tidak baik bagi kesehatan penghuninya, karena uap tanah dapat langsung terhirup khususnya pada malam hari.

Gambar 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Kota Singkawang, 2018

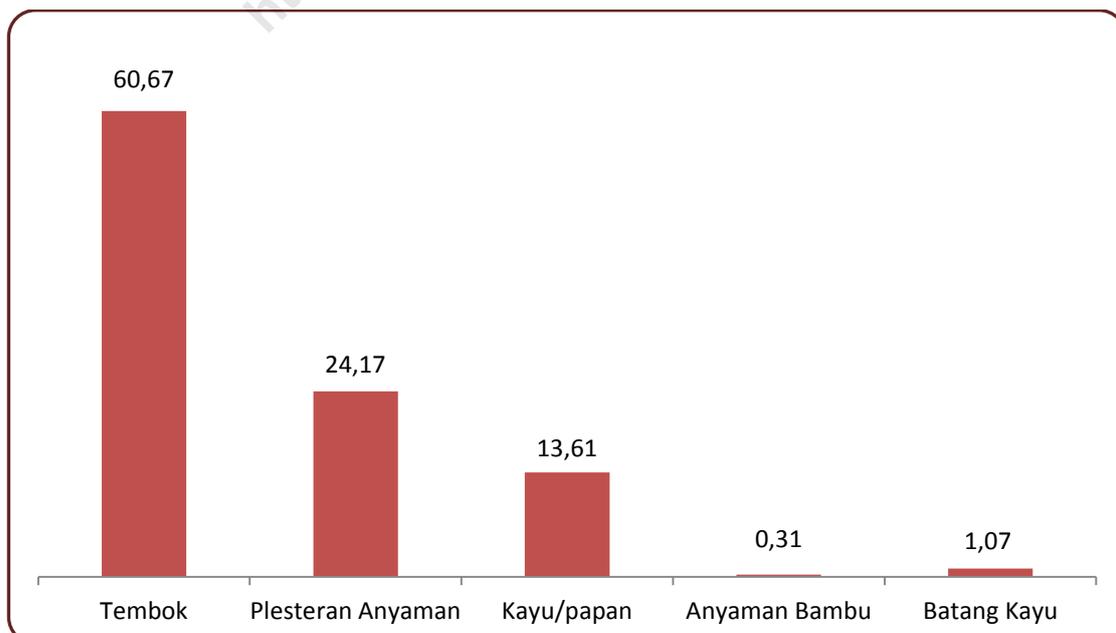


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

7.4. Jenis Dinding

Kualitas bangunan rumah dapat pula dilihat dari jenis dinding yang dipergunakan. Jenis dinding yang kokoh akan berpengaruh terhadap permanen atau tidaknya rumah yang dihuni.

Gambar 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Kota Singkawang, 2018



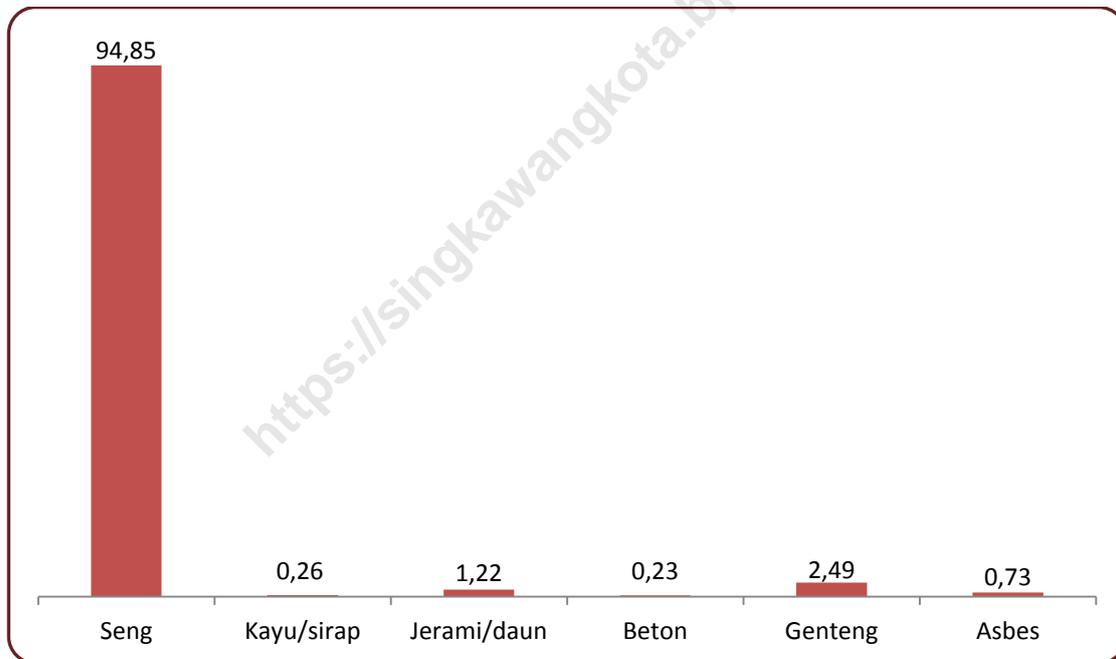
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Di Kota Singkawang pada tahun 2018 sebagian besar rumah tangga menggunakan jenis dinding tembok, yaitu sebesar 60,67 persen. Kemudian, jenis dinding terbanyak kedua adalah plesteran anyaman, yaitu 24,17 persen. Masih ditemukan rumah tangga yang menggunakan dinding anyaman bambu dengan persentase sebesar 0,31 persen.

7.5. Jenis Atap

Kualitas atap rumah yang baik biasanya menggunakan bahan-bahan tahan lama, seperti beton, kayu/sirap, seng/asbes, dan genteng. Jenis atap yang paling banyak digunakan rumah tangga di Kota Singkawang kondisi tahun 2018 adalah seng sebesar 94,85 persen. Sementara itu, terdapat 1,22 persen penduduk yang masih menggunakan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia sebagai bahan atap rumahnya.

Gambar 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Kota Singkawang, 2018



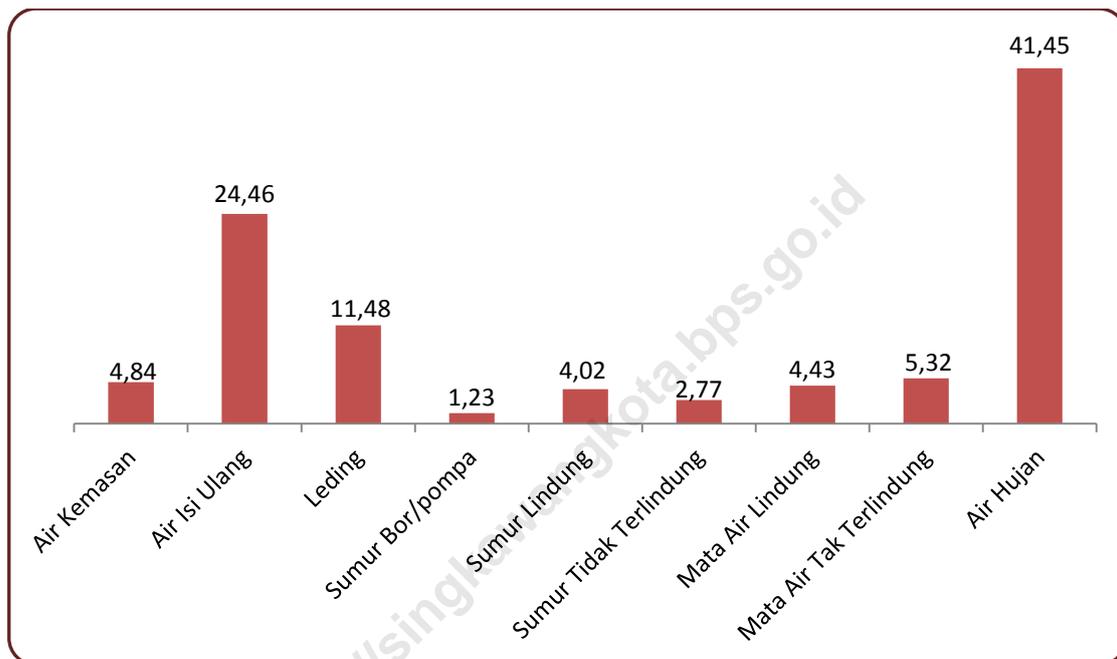
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

7.6. Sumber Air Minum Utama

Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi segenap makhluk hidup. Bagi manusia, terkait aspek perumahan, air digunakan untuk masak/minum dan mandi/cuci. Oleh karena itu, air tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, tetapi dibutuhkan air yang bersih dan higienis.

Untuk dapat memperoleh air minum yang berkualitas diperlukan banyak proses dan persyaratan. Akan tetapi, kualitas air paling dominan dipengaruhi oleh sumber air tersebut. Sumber air minum yang dikonsumsi penduduk Kota Singkawang cukup beragam, seperti sumur terlindung, mata air, air hujan, dan sebagainya.

Gambar 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

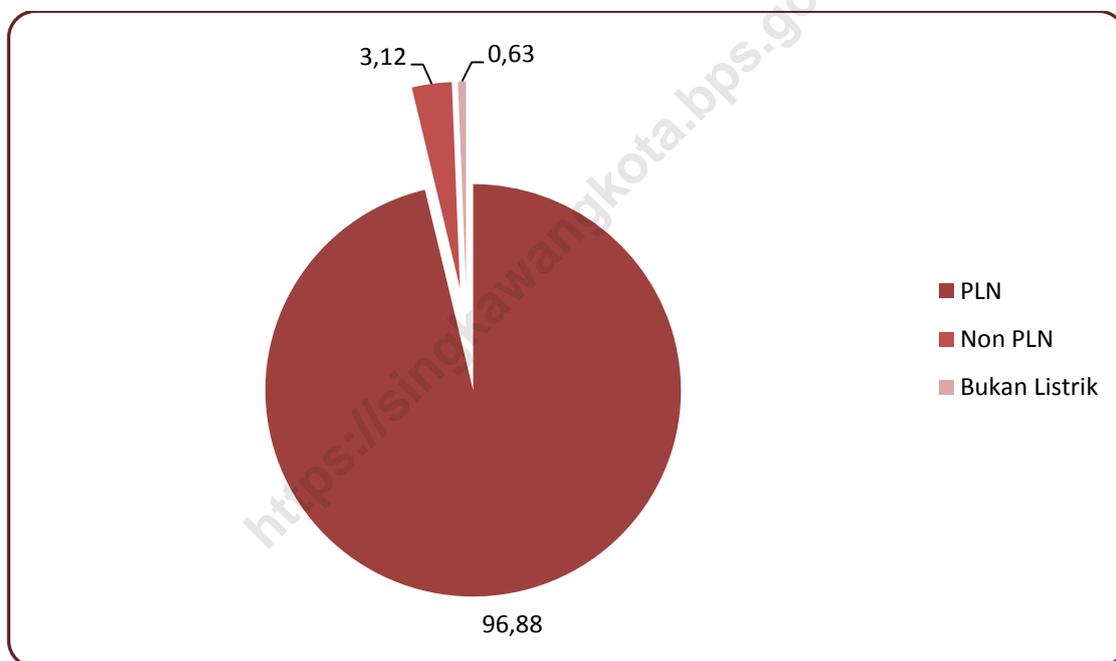
Sebanyak 41,45 persen rumah tangga di Singkawang tahun 2018 menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-harinya. Kemudian, sebanyak 24,46 persen rumah tangga menggunakan air isi ulang dan sebanyak 11,48 persen rumah tangga menggunakan leding sebagai sumber air minum sehari-hari.

Apabila dilihat dari sudut pandang kesehatan, konsumsi air hujan sebagai sumber air minum utama kurang baik karena kurang baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Air hujan tidak mengandung zat kapur yang sangat dibutuhkan untuk penguatan pertumbuhan tulang dan gigi.

7.7. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan listrik yang telah dapat menjangkau seluruh daerah menandakan tingkat kesejahteraan di daerah tersebut sudah baik. Secara umum, rumah tangga di Kota Singkawang telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama, yaitu sebesar 96,88 persen. Rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN ada sebanyak 3,12 persen sehingga rumah tangga ini menggunakan generator untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Selain itu, masih ada rumah tangga di Kota Singkawang yang belum menggunakan listrik, yaitu sebanyak 0,63 persen.

Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Kota Singkawang, 2018

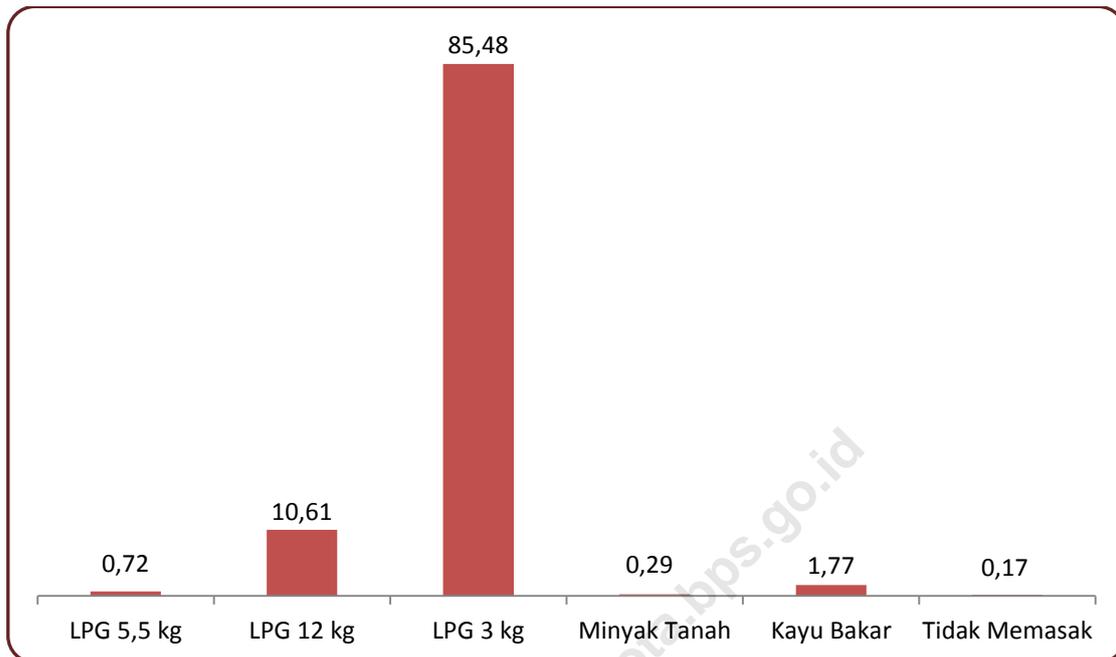


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

7.8. Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Hampir seluruh rumah tangga Kota Singkawang sudah menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak, yaitu sebesar 96,81 persen, dengan pengguna elpiji 3 kg sebesar 85,48 persen dan elpiji 12 kg sebesar 10,61 persen. Meskipun demikian, masih ada rumah tangga yang menggunakan minyak tanah dan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

Gambar 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak Kota Singkawang, 2018

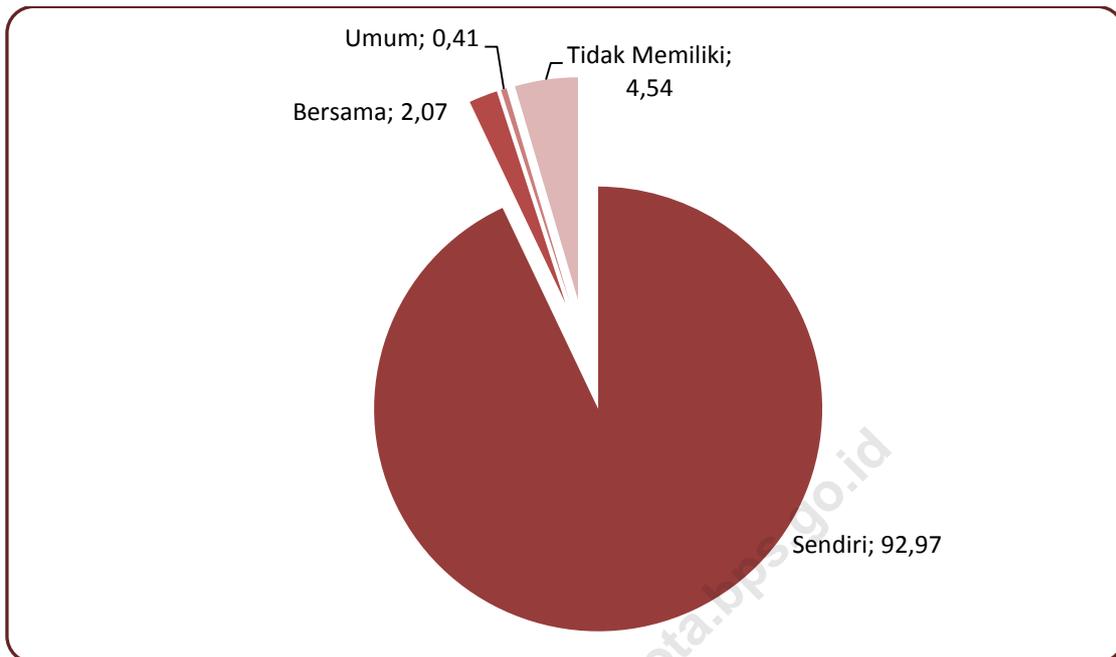


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

7.9. Fasilitas Jamban/Kakus

Salah satu fasilitas perumahan yang terkait dengan kesehatan lingkungan adalah kepemilikan jamban/kakus sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Pembuangan akhir tinja yang dianggap paling dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kesehatan adalah jamban/kakus milik sendiri dengan tangki septik. Jamban/kakus milik sendiri dengan tangki septik adalah jamban/kakus yang hanya dipergunakan oleh satu rumah tangga bersangkutan dan dibuat dengan menggunakan saluran pembuangan akhir ke tempat penampungan tinja (tangki).

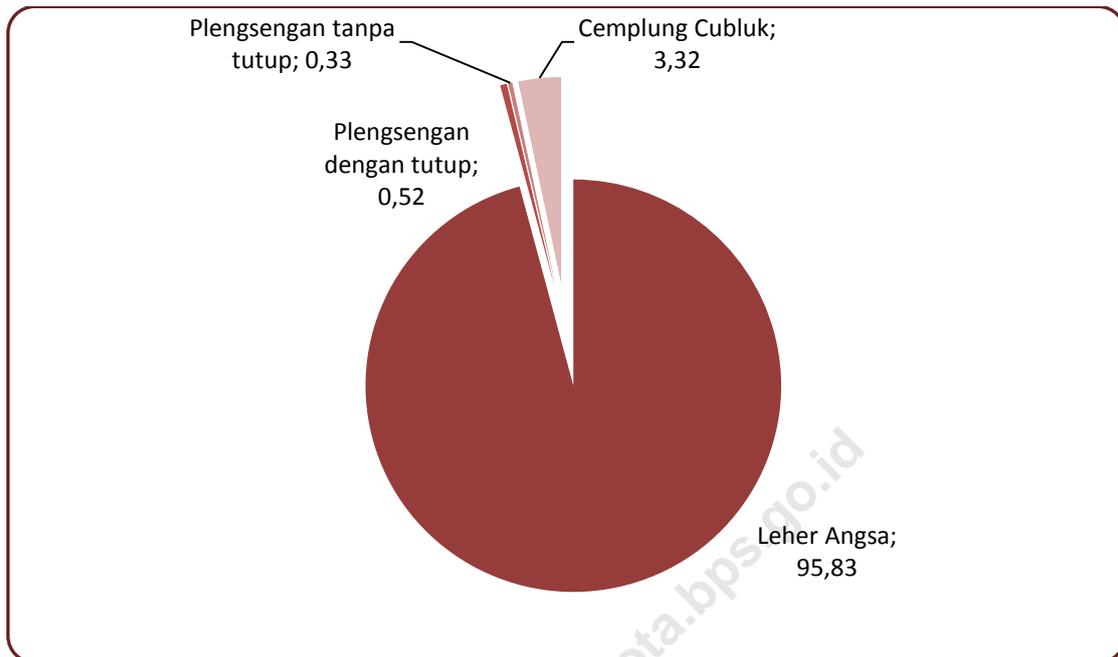
Gambar 7.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Jamban/Kakus Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

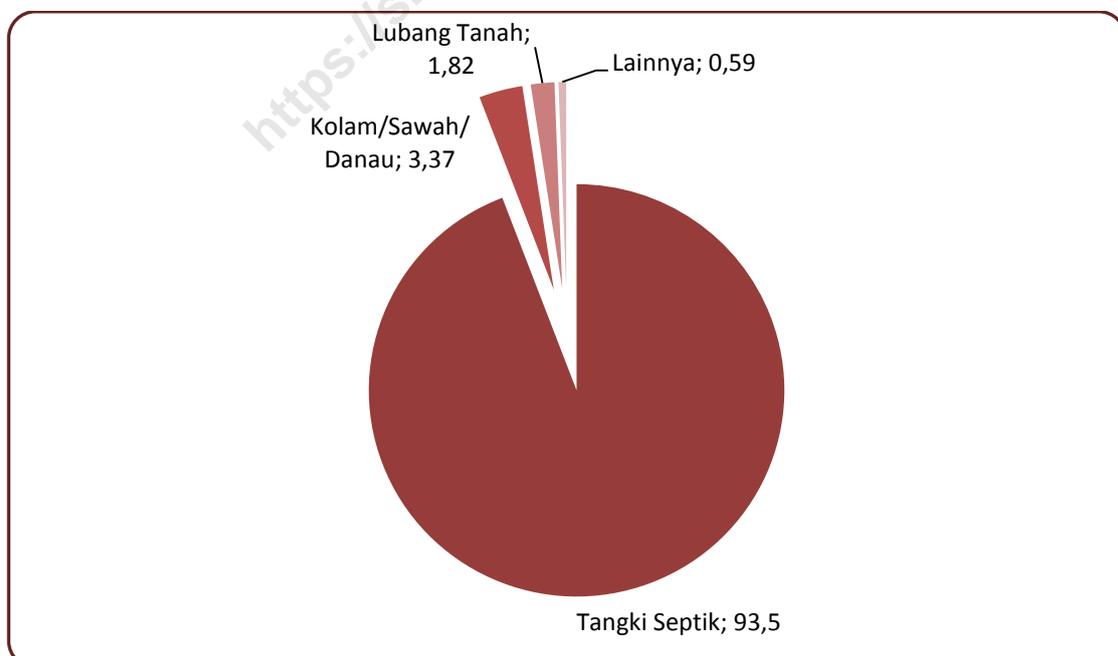
Hampir semua rumah tangga di Kota Singkawang memiliki fasilitas BAB sendiri yang hanya digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan, yaitu sebesar 92,97 persen (Gambar 7.9). Kemudian, terdapat 2,07 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB bersama, yaitu fasilitas BAB yang digunakan bersama dengan ART rumah tangga tertentu. Sementara itu, di Kota Singkawang pada tahun 2018 masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sama sekali, yaitu sebesar 4,54 persen. Kondisi ini dapat tergolong memerlukan perhatian khusus karena fasilitas pembuangan merupakan fasilitas yang vital untuk mewujudkan kualitas hidup yang berkualitas. Selain itu, rumah tangga di Kota Singkawang yang telah menggunakan kloset leher angsa sebesar 95,83 persen (Gambar 7.10).

Gambar 7.10. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Jamban/Kakus Menurut Jenis Kloset Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Gambar 7.11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Jamban/Kakus Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kota Singkawang, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa rumah tangga di Kota Singkawang sebagian besar telah menggunakan tangki septik dengan persentase sebesar 93,50 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sebesar 1,82 persen rumah tangga yang menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Selain itu, juga masih terdapat rumah tangga yang menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut sebagai tempat pembuangan akhir tinja, yaitu sebesar 3,37 persen. Pembuangan tinja langsung ke alam tentunya harus dicegah semaksimal mungkin karena dapat mencemari tanah dan sumber air.

<https://singkawangkota.bps.go.id>

BAB VIII

KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan pokok seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Meskipun demikian, masalah kemiskinan memang tidak dapat diatasi dengan mudah karena kemiskinan merupakan masalah multi dimesi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

8.1. Penduduk Miskin

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah penduduk miskin. Semakin berkurangnya penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk semakin meningkat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).

Tabel 8.1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Singkawang, 2013 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
(1)	(2)
2013	12.972
2014	11.971
2015	11.900
2016	11.210
2017	11.611
2018	11.168

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2013 – 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang adalah sebesar 11.168 jiwa sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar 11.610 jiwa.

Penurunan angka kemiskinan ini merupakan keberhasilan program pemerintah untuk menangani kemiskinan. Berdasarkan pengamatan dari faktor inflasi menunjukkan bahwa pada tahun kalender Maret 2018, laju inflasi Kota Singkawang sebesar 1,59 persen. Kemudian nilai Inflasi "Year on Year" (Maret 2018 terhadap Maret 2017) Kota Singkawang sebesar 4,99 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan harga komoditi di pasaran, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu pada tahun 2018 terjadi peningkatan nilai GK (Garis Kemiskinan) dari sebesar Rp.410.717 per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp.464.673 per kapita per bulan.

8.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2)

GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Tabel 8.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Singkawang, 2017-2018

Uraian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	410.717	464.673
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,73	0,70
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017 – 2018

Garis kemiskinan (GK) di Kota Singkawang tahun 2018 adalah sebesar Rp464.673 per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK juga perlu diperhatikan. Ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 Kota Singkawang pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017, nilai P1 adalah sebesar 0,73 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,70 (Tabel 8.2). Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk Kota Singkawang dari garis kemiskinan atau dengan kata lain jumlah penduduk yang rentan miskin semakin banyak.

Ukuran lain untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2018, nilai P2 Kota Singkawang sebesar 0,18. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menandakan bahwa pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Singkawang semakin tinggi.

BAB IX

SOSIAL LAINNYA

9.1. Penguasaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin pesat semakin memengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Teknologi informasi kini sudah tidak dianggap sebagai barang mewah tetapi sudah kebutuhan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara umum, layanan teknologi informasi mencakup penggunaan fasilitas berbasis telekomunikasi, seperti internet dan teknologi bergerak (*mobile technology*), layanan telekomunikasi bernilai tambah, seperti komunikasi melalui komputer pribadi dan layanan data, serta layanan siaran, seperti TV, radio, dan satelit siaran.

Tabel 9.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan Terakhir Kota Singkawang, 2018

Pendidikan Tertinggi	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	27,10	21,37	11,63	18,56
2. SD/ sederajat	21,84	22,37	13,92	19,25
3. SMP/ sederajat	17,63	18,87	20,03	19,30
4. SMA ke atas	33,43	38,38	54,42	42,89
Kota Singkawang	100	100	100	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 di Kota Singkawang penggunaan telepon seluler selama tiga bulan terakhir oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas paling banyak dilakukan oleh yang pendidikan terakhir SMA ke atas, yaitu sebesar 33,43 persen. Kemudian disusul oleh yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD, yaitu sebesar 27,10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan cenderung tidak memengaruhi kemampuan seseorang dalam penggunaan telepon seluler. Terlebih lagi, di era milenial sekarang ini, sudah banyak anak kecil yang dapat menggunakan HP dengan cukup lancar.

Internet merupakan salah satu sumber informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang berperan penting dalam kehidupan penduduk masa sekarang. Dengan internet, pertukaran informasi terjadi secara cepat. Di Kota Singkawang pada tahun 2018, akses internet selama tiga bulan terakhir yang dilakukan oleh penduduk umur 5 tahun ke atas paling banyak penduduk dengan pendidikan terakhir SMA ke atas, yaitu sebesar 42,89 persen (Tabel 9.1).

9.2. Kepemilikan Aset

Kebutuhan utama manusia adalah sandang, papan, dan pangan. Namun, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan manusia, kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier pun perlahan dapat terpenuhi. Terkadang, kebutuhan yang semestinya tergolong kebutuhan sekunder ataupun tersier telah berubah menjadi kebutuhan yang vital untuk mendukung produktivitas manusia sehari-harinya, seperti sepeda motor, telepon seluler, televisi, dan lainnya. Kemampuan suatu rumah tangga untuk memiliki aset-aset tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Melalui tabel 9.2, dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki sepeda motor dan lemari es/kulkas dengan persentase sebesar 88,29 persen dan 76,74 persen. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sepeda motor memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting karena kurang tersedianya fasilitas angkutan umum yang memadai di Kota Singkawang. Tidak hanya itu, kebutuhan akan lemari es/kulkas juga sudah merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk rumah tangga karena sangat bermanfaat untuk menyimpan bahan makanan/minuman sehingga dapat lebih tahan lama.

Tabel 9.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset Kota Singkawang, 2018

Jenis Aset (1)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset (2)
Tabung gas 5,5 kg atau lebih	18,02
Lemari es/ kulkas	76,74
AC/Pemanas air	21,03
Emas/perhiasan (minimal 10 gram)	26,81
Sepeda motor	88,29
Perahu/ perahu motor	3,41
Mobil	9,55
Televisi layar datar (minimal 30 inci)	20,94

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kota Singkawang, 2018

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik
Kota Singkawang
Jln. Jendral Ahmad Yani
No. 75 Kel. Pasiran
Singkawang Barat
Telp: (0562) 637678
Email: bps6172@bps.go.id

